



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Kliping Digital Media Online**

**Ekonomi**

**Kamis, 16 Desember 2021**



**BIRO HUMAS DAN TATA USAHA PIMPINAN  
Perpustakaan & Kearsipan  
Jakarta  
2021**

## **Daftar Isi**

1. SURPLUS NERACA PERDAGANGAN MENGUAT - *Media Online Kompas*
2. SINERGI PENDANAAN INKLUSIF UNTUK PENCAPAIAN SDGs - *Media Online Kompas*

## Surplus Neraca Perdagangan Menguat

Kenaikan harga sejumlah komoditas global terus memacu kinerja positif ekspor dan neraca perdagangan Indonesia. Ekspor komoditas bernilai tambah dan berteknologi tinggi juga terus meningkat.

**JAKARTA, KOMPAS** — Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-November 2021 surplus 34,32 miliar dollar AS atau Rp 492,42 triliun. Nilai surplus neraca perdagangan pada Januari-November 2021 itu hampir dua kali lipat dari surplus pada periode serupa tahun 2020 yang sebesar 19,52 miliar dollar AS.

Surplus tersebut tidak terlepas dari kinerja positif ekspor yang ditopang oleh lonjakan harga komoditas lemak dan minyak hewan/nabati, termasuk minyak kelapa sawit mentah, serta bahan bakar mineral, seperti batubara. Hal itu juga diikuti dengan lonjakan ekspor sejumlah komoditas bernilai tambah relatif tinggi, seperti besi dan baja, serta mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari-November 2021, total nilai ekspor migas dan nonmigas mencapai 209,16 miliar dollar AS, lebih tinggi daripada nilai impor Januari-November 2021 yang sebesar 174,84 miliar dollar AS.

Lemak dan minyak hewan/nabati serta bahan bakar mineral berkontribusi terhadap ekspor masing-masing senilai 29,68 miliar dollar AS (15,08 persen) dan 29,59 miliar dollar AS (14,94 persen). Ekspor lemak dan minyak hewan/nabati serta bahan bakar mineral itu masing-masing tumbuh 64,95 persen dan 90,52 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

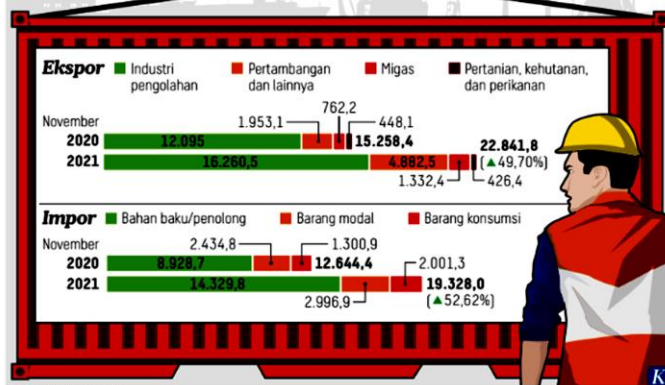
Begitu juga dengan ekspor besi dan baja serta mesin dan perlengkapan elektrik yang nilainya masing-masing sebesar 18,62 miliar dollar AS dan 10,57 miliar dollar AS. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, ekspor besi dan baja tumbuh 92,83 persen, sedangkan mesin dan perlengkapan elektrik tumbuh 27,99 persen.

BPS juga mencatat, pada November 2021, neraca perdagangan Indonesia melanjutkan tren surplus selama 19 bulan berturut-turut. Surplus neraca perdagangan pada November 2021 sebesar 3,51 miliar dollar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada November 2020 yang sebesar 2,59 miliar dollar AS.

### Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia

Data 15 Desember 2021

( ) Perubahan dibandingkan dengan November 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

INFOGRAFIK: HANS

"Kinerja ekspor yang sangat positif ini tentu saja akan turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Sepanjang 11 bulan pertama 2021, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan nonmigas dengan sejumlah negara, misalnya dengan Amerika Serikat tercatat surplus 15,4 miliar dollar AS serta negara-negara di kawasan ASEAN (11,52 miliar dollar AS).

Indonesia juga mampu mengurangi defisit neraca perdagangan nonmigas dengan China. Pada Januari-November 2021, defisit dagang Indonesia terhadap China sebesar 3,49 miliar dollar AS. Defisit ini lebih kecil dibandingkan dengan defisit pada Januari-November 2020 yang mencapai 4,9 miliar dollar AS.

Sebelumnya, sepanjang periode 2015-2019, rata-rata defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap China senilai 15 miliar dollar AS per tahun.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperkirakan, defisit dagang Indonesia dengan China pada 2024 bisa nol. Hal ini tidak terlepas dari ekspor Indonesia ke China yang mulai didominasi oleh produk yang sudah memiliki nilai tambah, seperti besi dan baja.

Lutfi juga meminta agar masyarakat tidak khawatir dengan implementasi perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Ia meyakinkan bahwa RCEP bukan

perjanjian yang mengkomodifikasi kepentingan China dan dominasi China di dunia.

RCEP justru bisa menjadi penyeimbang kekuatan-kekuatan perdagangan global, seperti Kerjasama Trans-Pasifik (TPP) yang diinisiasi AS.

RCEP menempatkan ASEAN, termasuk Indonesia, sebagai pusat konektivitas kawasan yang akan berperan menggerakkan rantai pasok regional, bahkan global.

"Oleh karena itu, saya berharap Dewan Perwakilan Rakyat merampungkan ratifikasi perjanjian RCEP sehingga dapat segera diimplementasikan pada Januari 2022. Hingga kini, lima negara mitra ASEAN, yakni Korea Selatan, Jepang, China, Australia, dan Selandia Baru, serta tujuh negara anggota ASEAN telah meratifikasi perjanjian itu," ujar Lutfi.

#### Ekspor yang berkualitas

Lutfi juga menjelaskan, impor yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sekitar 90 persen merupakan bahan baku dan penolong. Ini merupakan barang-barang investasi untuk kegiatan produksi di dalam negeri dan dapat menopang pertumbuhan ekspor nasional.

BPS mencatat, total nilai impor Indonesia pada Januari-November 2021 sebesar 174,84 miliar dollar AS. Dari total nilai itu, sebesar 131,75 miliar dollar AS (75,36 persen) merupakan impor bahan baku dan penolong serta 25,39 miliar dollar AS (14,52 persen) me-

rupakan impor barang modal. Adapun sisanya merupakan barang konsumsi.

Lutfi menekankan, ekspor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan ekspor yang berkualitas. Di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas global, seperti batubara dan CPO, ekspor Indonesia memang masih didominasi kedua komoditas itu.

"Namun, urutan ketiga ekspor Indonesia ditempati oleh besi dan baja yang tumbuh di atas 70 persen. Kemudian ekspor kendaraan bermotor dan suku cadangnya juga tumbuh hampir 40 persen," katanya.

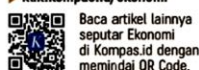
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada Januari-Oktober 2021, Indonesia telah mengekspor kendaraan bermotor dan suku cadangnya senilai 7,1 miliar dollar AS.

Dari jumlah itu, ekspor komoditas berteknologi tinggi ke Filipina tercatat sebesar 23 persen, Vietnam 10,5 persen, Thailand 10 persen, dan Jepang 7,6 persen.

Hal itu juga merupakan hasil dari perjanjian perdagangan. Dengan Jepang, misalnya, ada komitmen dari perusahaan otomotif Jepang untuk mengimpor kendaraan yang diproduksi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kapasitas produksi kendaraan di Indonesia lebih besar ketimbang di Jepang.

"Nilai yang dimaksud dengan pentingnya perdagangan berbasis rantai pasok. Hal itu tidak bisa terelakkan lagi," ujar Lutfi. (HEN)

▶ [klik.kompas.id/ekonomi](https://klik.kompas.id/ekonomi)



Baca artikel lainnya seputar Ekonomi di Kompas.id dengan memindai QR Code.

## Sinergi Pendanaan Inklusif untuk Pencapaian SDGs

Indonesia tetap optimistis untuk terus berkomitmen mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdisrupsi akibat pandemi Covid-19. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kunci yang disampaikan pada United Nation High Level Political Forum (UN HLPF) pada Juli 2021 lalu. Indonesia kini harus cermat menjalankan strategi pembangunan agar agenda 2030 tercapai cepat waktu.

Sejak 2015, tujuh tahun sudah pencapaian SDGs di Indonesia dilalui Tim Koordinasi Nasional (TKN) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, TKN meliputi segenap pemangku kepentingan, dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, pakar dan akademisi, hingga media massa. Di sisa waktu mencapai agenda 2030, yakni delapan tahun ke depan, SDGs harus terus dilaksanakan sebagai *collective action* yang perlu dioptimalkan agar pencapaian capaian dapat terlaksana.

Dalam UN HLPF, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharto Monorita selaku Koordinator Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs Indonesia turut menyampaikan Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021 yang memperlihatkan pentingnya upaya gotong royong berbagai pihak dan analisis mendalam dari banyak data pencapaian SDGs Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah dua kali menyampaikan VNR, pertama kali pada 2017 dan kedua kalinya pada 2019 seiring dengan disampainya VNR 2021. Indonesia masuk dalam daftar 10 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menyampaikan VNR untuk ketiga kalinya. Mengunggul priority initiatives, VNR 2021 disusun dengan tahapan konsultasi publik yang melibatkan lebih dari 500 partisipan,

memotret inovasi pembangunan. Di setiap upaya pembangunan, terlihat satu benang merah yang sangat penting untuk dipastikan berjalan, yakni kolaborasi dan kerja sama.

### Pendanaan Inklusif SDGs

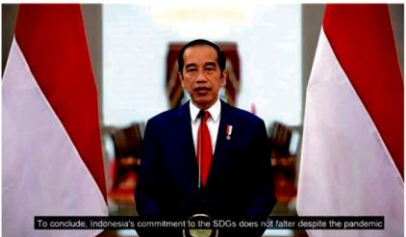
Semangat gotong royong juga diturunkan untuk memastikan pendanaan pelaksanaan SDGs tetap berjalan, meski ekonomi Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Sesuai amanat Perpres SDGs, semangat kolaborasi tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) 2021-2024 yang diluncurkan dalam Konferensi Tahunan SDGs 2021 bertema "Recovery and Resilience: Pendanaan Inklusif untuk Pencapaian SDGs 2030" yang dilaksanakan pada 23-24 November 2021. Konferensi tahunan tersebut dibuka Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs Indonesia.

"Percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar. Sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar. Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen. Kewytatan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dari tingkat global, nasional, daerah, hingga tingkat desa untuk menutup celah pembiayaan. Aspek pembiayaan ini menjadi kunci, mengingat kesediaan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju

dan negara berkembang. Untuk itu, masing-masing pencapaian 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah serta disesuaikan dengan konteks Indonesia," ujar Wapres RI Ma'ruf Amin selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs Indonesia, Selasa (23/11).

Untuk itu, pencapaian TPB/SDGs harus melibatkan semua pihak, melalui paradigma *co-creation*, termasuk pendanaan melalui mekanisme *co-financing*. "Indonesia senantiasa berkomitmen untuk tidak menurunkan target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian SDGs 2030, meskipun disrupsi pencapaian target SDGs dipengaruhi akibat pandemi Covid-19. Komitmen tersebut memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak *business as usual*. Salah satu tantangan yang besar di antaranya adalah pembiayaan untuk SDGs," tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharto Monorita selaku Koordinator Pelaksana Nasional Pencapaian SDGs.

Berdasarkan "Peta Jalan SDGs menuju 2030" telah dilakukali kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs sebesar Rp 67 ribu triliun dengan selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp 14 ribu triliun. Setelah pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs bisa dipastikan meningkat signifikan. Perbandingan dari kalkulasi pembiayaan di tingkat global, dampak pandemi telah meningkatkan kebutuhan pendanaan sebesar 70 persen untuk mencapai SDGs.



President Joko Widodo memberikan keynote address dalam penutupan Forum Politik Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi dan Sosial Perkeratan Bangsa-Bangsa secara virtual pada Selasa, 13 Juli 2021.

Sebagai langkah konkret upaya capaian SDGs, Kementerian PPN/Bappenas memantapkan RAN SDGs 2021-2024 menggunakan analisis pencapaian indikator SDGs, termasuk mempertimbangkan dampak pandemi, hingga menentukan target dan arah kebijakan untuk mencapainya. Beberapa dokumen kebijakan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAN SDGs 2021-2024, di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah mengarusutamakan 124 target SDGs, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Proses penyusunan RAN melibatkan semua pemangku kepentingan secara luas. Fasilitas dan pendampingan dilakukan pada berbagai organisasi keagamaan, filantropi, para pelaku usaha termasuk Bursa Efek Indonesia, dan berbagai perusahaan milik negara dengan kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, ribuan rencana kegiatan pemerintah dan nonpemerintah untuk pencapaian SDGs dimasukkan pada matriks lampiran, sebagai satu bagian tak terpisahkan dari RAN.

Selain membahas implementasi RAN, dalam konferensi tersebut, turut diluncurkan *SDGs Dashboard 2.0* yang berisikan capaian indikator SDGs secara terpadu hingga pencapaian daerah. Selain itu, *SDGs Dashboard 2.0* juga menyajikan *SDGs Investment Platform* yang memperlihatkan pemetaan potensi dan peluang investasi berkelanjutan juga terbuka untuk publik. Ke depan, strategi pendanaan SDGs tidak bisa hanya bertumpu pada terbatasnya anggaran

pemerintah yang tengah difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki *holistic view* dan peta besar SDGs, berupaya mengoptimalkan berbagai potensi pendanaan di luar pemerintah untuk bersinergi bersama memastikan pencapaian SDGs di 2030. Kelembagaan SDGs Financing Hub yang kini dalam tahap finalisasi, segera berperan melakukan orkestrasi, sinergi dan integrasi berbagai potensi pendanaan maupun inovasinya," ujar Suharto. Melalui kelembagaan ini, berbagai indikator SDGs yang berdasarkan analisis *interconnectedness* memiliki *leverage* tinggi dan *multipplier effect* besar akan mendapatkan tambahan sumber daya. Prioritas lain yang menjadi tambahan, termasuk pada indikator yang masih *off-track*.

Konferensi Tahunan SDGs turut dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif UNESCAP Armida Alinjahana, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua BKSAP DPR Fadli Zon, serta Ketua Dewan Komisior Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. Konferensi yang dihadiri sekitar 900 orang secara daring tersebut juga menghadirkan pembicara dari UN Resident Coordinator Indonesia Valerie Juliano, UNDP Resident Representative Indonesia Noritama Shinomura, Deputy Executive Director of UN Women Anita Bhatia, Perwakilan Financing for Sustainable Development Office UNDESA Sharon Spiegel, Vice Chair Board Members of UN Global Compact Paul Polman, dan Vice Chair of Asian Venture Philanthropy Network Melissa Kwee. [ ]

